



RENJA PERUBAHAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

polpp@lamongankab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Mastrip No. 52 Kode Pos : 62251
Telepon : (0322) 322724 E-mail : polpp@lamongankab.go.id
Website www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ 85 /413.126/KEP/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 perlu membentuk Tim Penyusun Renja dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. ;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 6322) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan; dan
13. Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Susunan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagaimana terlampir keputusan.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**



JARWITO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701022 199003 1 003

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lamongan
Nomor : 188 / / Kep. / 413. 126 / 2025
Tanggal : 01 Juni 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KET (KEDUDUKAN DALAM PANITIA)
1	2	4	5
1	JARWITO, S.H	Kepala Satuan	Pengarah
2	KAMSUN, S.H., M.M.	Sekretaris	Penanggungjawab
3	UMI MARDHIYAH, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Koordinator
4	YOHAN FIRMANSYAH, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Ketua
5	BAIHAQI REZA AZZUHRI, S.ST.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
6	MASLAHATUNNISAK, S.Agr	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 01 Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**


JARWITO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701022 199003 1 003



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode triwulan akhir tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Sebagaimana Surat Edaran Bupati Lamongan tanggal 25 Februari 2025 nomor : 050/195/413.204/2025 tentang Penyusunan Perubahan Tahun 2023 dan Pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang. Selanjutnya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang beserta jajarannya yang telah bekerja keras menyusun dokumen Renja ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan

Lamongan, Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN



JARWITO, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701022 199003 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja perangkat daerah.

Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sampai akhir Tahun 2025. Didalam Renja juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya untuk dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2025, mengacu dasar sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud



Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan tahun 2025 berdasarkan ranwal RPJMD 2025-2029 adalah karena adanya perubahan anggaran dan agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan secara terperinci dan terorganisasi serta terjadwal dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang nantinya akan dijadikan tolok ukur dalam pengukuran capaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah (1) agar tersedia dokumen perencanaan tahunan untuk pedoman operasional bagi seluruh Pejabat dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk selama jangka waktu satu tahun anggaran 2025, (2) agar tersedia pedoman tolok ukur dalam pengukuran capaian kinerja seluruh Pejabat dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, untuk bisa mengetahui tingkat keberhasilan dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk selama jangka waktu satu tahun anggaran 2025, dan (3) Agar semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh seluruh



Pejabat dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan



secara konsisten mengarah pada terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Bab ini memuat:

- 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tribulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD



Bab ini memuat:

- 3.1. Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- 3.3. Perubahan Program Dan Kegiatan;

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat:

- a. Kesimpulan
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- d. Rencana tindak lanjut



BAB II
EVALUASI RENJA PD
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tribulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Lamongan selama tahun 2024. Pada Tahun 2025 total anggaran Satpol PP Kabupaten Lamongan sebesar **Rp. 18.273.832.691,-** dan terealisasi sampai dengan Tribulan II sebesar **Rp. 3.360.288.288,-, dengan persentase 18,39%** pada pelaksanaan 3 program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2025 dan pencapaian Renstra Satpol PP Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :



TABEL 2.1
REKAPILUTASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TRIBULAN II TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s/d Tb I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2				3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100 %	12	13
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1 5 URUSAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT																					
	1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	78,709,395,243	100 %	11,332,892,813	100 %	15,169,250,110	0%	3,360,288,288	0%	0.00	1	14,693,181,101			
	1	5	1	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu	100 %	608,959,336	100 %	34,404,100	100 %	33,352,100	34.38 %	-				34,404,100			
	1	5	1	2.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	25	227,592,092	5	6,760,000	5	6,412,800	5	-	100%	0%	10	6,760,000			



0



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

	1	5	1	2.0 2	5	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	146,842,594	3	9,920,000		7,193,600	0	-	#VALUE !								
	1	5	1	2.0 2	7	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Seme steran SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Se mesteran SKPD	84	146,842,594	14	9,944,000	14	7,104,200	3	-	21%								
	1	5	1	2.0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	146,842,594	12	9,645,500	12	7,783,500	4	-	33%								
	1	5	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaia n yang terlaksana	100 %	1,678,797,660	100 %	49,081,000	0%	-	0%	-									



1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	1,455,043,146	1	49,081,000	0	-	0	-	#DIV/0!							
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	223,754,514	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!							
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang tersedia dan terselenggara	100 %	731,169,155	100 %	66,040,350	100 %	61,484,500	2%	-								
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	40,422,908	12	4,997,700	14	7,496,700	1	-	7%							
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	130	131,414,015	17	10,000,000	12	9,990,000	0	-	0%							



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

1	5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	125	206,740,327	16	14,887,900	13	12,373,300	0	-	0%						
1	5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	5	131,414,015	1	12,304,250	1	11,250,000	0	-	0%						
1	5	1	2.0 6	6	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5	32,348,065	1	6,930,000	1	7,983,000	0	-	0%						
1	5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	188,829,825	19	16,920,500	9	12,391,500	0	-	0%						
1	5	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	648,843,778	100 %	29,191,260	100 %	14,660,500	0%	-							
1	5	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	128,694,486	1	14,550,240	1	14,660,500	0	-	0%						



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

	1	5	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	46	520,149,292	3	14,641,020	0	-	0	-	#DIV/0!							
	1	5	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	32,535,657,087	100 %	3,983,048,654	100 %	2,781,800,618	25%	815,389,087	25%							
	1	5	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	20,217,541	1	4,962,500	1	4,954,000		-	0%							
	1	5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	341,558,105	12	90,138,566	3	203,279,280	3	22,688,962	100%							
	1	5	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	141,522,786	1	8,089,050	1	7,528,000		-	0%							



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

	1	5	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	70	32,032,358,655	14	3,879,858,538	14	2,566,039,338	4	792,700,125	29%							
	1	5	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 %	1,001,055,501	100 %	206,265,400	100 %	390,012,700	5%	22,425,000	5%							
	1	5	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	180,001,376	2	40,369,900	2	58,045,400	0	4,500,000	0%							
	1	5	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85	629,352,519	17	165,895,500	17	281,967,300	1	17,925,000	6%							



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

	1	5	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/dir rehabilitasi	5	191,701,606	0	-	1	50,000,000	0	-	0%							
	1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase penyelesaian pelanggaran gangguan trantibum	100 %	12,697,927,923	100 %	3,562,746,324	100 %	3,065,862,880	100%	54,870,200	100%							
							2. Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkara	100 %		100 %		100 %		100%		100%							
	1	5	2	2.0 1		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran gangguan trantibum yang tertangani	500	4,246,455,894	336	882,382,250	34	135,962,900	8	-	24%							
	1	5	2	2.0 1	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dok. Hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibumlin mas Tk. Kab./Kota	125	556,961,306	54	496,089,000	20	9,469,700	6	-	30%							



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

	1	5	2	2.0 1	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dok. Yg memuat hasil pemberdaya an Linmas dalam rangka Trantibum	5	567,831,470	1	19,609,500	1	18,908,900	0	-	0%								
	1	5	2	2.0 1	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yg ditingkatkan kapasitasny a	1160	1,706,081,210	50	40,808,500	86	43,524,500	8	-	9%								
	1	5	2	2.0 1	6	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dok. Hasil pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	228,493,007	1	8,662,500	1	5,261,100	1	-	100%								
	1	5	2	2.0 1	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yg dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamana	100	506,961,306	143	293,158,750	20	35,153,600	5	-	25%								



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

							n dan pengawasan																
	1	5	2	2.0 1	16	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan Unras dan Kerusuhan Massa yg dilakukan penindakan	500	670,127,595	193	24,054,000	14	21,645,100	3	-	21%							
	1	5	2	2.0 1	17	Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	5	10,000,000	0	-	1	2,000,000	0	-								
	1	5	2	2.0 2		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	900	8,451,472,029	52	2,680,364,074	40	2,929,899,980	6	54,870,200								



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

1	5	2	2.0 2	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Lap. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kpd masy./kelmas/pelaku usaha	250	302,157,343	60	1,569,973,750	82	588,046,280	10	-								
1	5	2	2.0 2	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Lap. Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Pergub yg dapat ditangani sesuai SOP	750	7,500,000,000	45	1,100,648,824	40	2,332,070,000	5	54,870,200								
1	5	2	2.0 2	12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Lap. Hasil pelaksanaan pengawasan yg dilakukan thp Kepatuhan Pelaksanaan Perda dan Perbup./Perwalkot	5	649,314,686	7	9,741,500	6	9,783,700	1	-								
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100 %	2,427,975,391	100 %	48,563,250	100 %	38,719,700	14%									



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

	1	5	4	2.0 1		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran dan kejadian non kebakaran yang tertangani	300	2,024,489,377	169	38,872,250	100	32,252,800	14	-								
	1	5	4	2.0 1	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dok. NPSM Pencegahan /Penanggula ngan Kebakaran dlm Daerah Kab./Kota setiap thnya	5	403,015,237	1	10,000,000	0	-										
	1	5	4	2.0 1	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiaga an Petugas Piket dan Penyelamat an/Evakuasi Saat Penanggula ngan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	5,192,000	0	0	100	5,192,000	14	-								

20



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

	1	5	4	2.0 1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.	100 %	403,486,014	100 %	9,691,000	100 %	6,466,900	0	-								
	1	5	4	2.0 1	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yg mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	3600	403,486,014	1339	9,691,000	625	6,466,900	0	-								



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kinerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan didukung oleh 3 program yang terdiri dari 1 program pendukung dan 2 program utama, target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, memiliki 11 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan pendukung dan 4 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia; dan



3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut:



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional		IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2024	2024	2025	
1	2	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta mewujudkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	1	Persentase penanganan pelanggaran gangguan trantibum dan peraturan daerah yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terselesaikan
		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tertangani



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat perencanaan yang partisipatif, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan harapan stakeholder. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana baik pada sektor pelayanan PMK maupun akomodasi mobil pemadam;
- b. Masih dijumpai kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak taat Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- c. Petugas/anggota yang benturan langsung dengan masyarakat yang dianggap mengganggu dalam usaha mencari nafkah;
- d. Perlu adanya sosialisasi tentang Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
- e. Belum optimalnya sinergitas Peraturan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural serta pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Terbatasnya sarana dan prasarana.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini akan diketahui adanya perubahan pada awal perencanaan tahun lalu atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berjalannya waktu sampai dengan tribulan II dikarenakan pada beberapa kegiatan menyesuaikan dengan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan yang membutuhkan penambahan belanja anggaran, juga pada beberapa kegiatan juga dilakukan pergeseran rincian belanja sehingga antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga mengalami perubahan.

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025, sehubungan dengan adanya perubahan anggaran, maka di tribulan akhir terjadi perubahan rencana kerja.



Tabel 2.3
USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN LAMONGAN

Nomor						RANCANGAN AWAL OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	05	01				Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Kab. Lamongan	100%	21,415,339,800	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Kab. Lamongan	100%	15,169,250,110	
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	100%	56,939,300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terselesaikan tepat waktu	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	100%	33,352,100	
1	05	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	5 Dokumen	25,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	5 Dokumen	6,412,800	
1	05	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	0	-	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	0	-	
2	05	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamongan	2 Laporan	6,939,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamongan	2 Laporan	6,939,300	
1	05	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	9 Laporan	25,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	9 Laporan	20,000,000	
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan	Kab. Lamongan	100%	9,722,450,700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan	Kab. Lamongan	100%	11,887,939,692	



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	139 Orang/Bulan	9,677,450,700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	1.946 Orang	11,865,858,392	
1	05	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamongan	3 Lap.	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamongan	3 Lap.	7,193,600	
1	05	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Lamongan	14 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Lamongan	14 Laporan	7,104,200	
1	05	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lamongan	12 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lamongan	12 Dokumen	7,783,500	
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	100%	450,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	0%	-	
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lamongan	234 Paket	350,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lamongan	0	-	
1	05	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	5 Orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	0	-	
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang tersedia dan terselenggara	Kab. Lamongan	100%	141,075,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang tersedia dan terselenggara	Kab. Lamongan	100%	61,484,500	
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	20 Paket	7,496,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	14 Paket	7,496,700	
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	30 Paket	20,614,100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Paket	9,990,000	



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	40 Paket	29,999,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	13 Paket	12,373,300	
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Paket	11,250,000	
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamongan	1 Dok.	7,966,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamongan	1 Dok.	7,983,000	
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	141 Laporan Perjalanan Dinas	50,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	9 Laporan Perjalanan Dinas	12,391,500	
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Kab. Lamongan	100%	5,565,442,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Kab. Lamongan	100%	14,660,500	
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Lamongan	4 Unit	5,430,442,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Lamongan	0	-	
1	05	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lamongan	50 Unit	35,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Unit	14,660,500	
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lamongan	0	-	
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	100%	4,437,136,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	100%	2,781,800,618	
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lamongan	1 Laporan	4,990,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lamongan	1 Laporan	4,954,000	
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Laporan	120,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Laporan	203,279,280	
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Laporan	25,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Laporan	7,528,000	
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	14 Laporan	4,287,146,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	14 Laporan	2,566,039,338	



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Lamongan	100%	1,042,296,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Lamongan	100%	390,012,700	
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Lamongan	2 Unit	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Lamongan	2 Unit	58,045,400	
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lamongan	18 Unit	342,296,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lamongan	17 Unit	281,967,300	
1	05	01	2	09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lamongan	4 Unit	600,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lamongan	1 Gedung	50,000,000	
1	05	02				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran gangguan trantibum	Kab. Lamongan	100%	3,991,656,700	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran gangguan trantibum	Kab. Lamongan	100%	3,065,862,880	
							Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah		100%			Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah		100%		
1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran gangguan trantibum yang tertangani	Kab. Lamongan	90 Pelanggaran	908,075,000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran gangguan trantibum yang tertangani	Kab. Lamongan	34 Pelanggaran	135,962,900	
1	05	02	2.01	03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lamongan	10 Dokumen	80,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lamongan	20 Dokumen	9,469,700	



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum	Dalam Kabupaten	4 Dokumen	226,200,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum	Dalam Kabupaten	1 Dokumen	18,908,900	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dalam Kabupaten dan luar Kabupaten	225 Orang	400,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dalam Kabupaten dan luar Kabupaten	86 Orang	43,524,500	
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dalam Kabupaten dan luar Kabupaten	1 Dokumen	20,000,000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dalam Kabupaten dan luar Kabupaten	1 Dokumen	5,261,100	
1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Lamongan	150 Laporan	80,000,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Lamongan	20 Laporan	35,153,600	
1	05	02	2.01	16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Lamongan	24 Kasus	100,000,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Lamongan	14 Laporan	21,645,100	
1	05	02	2.01	17	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Lamongan	1 laporan	1,875,000	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Lamongan	1 laporan	2,000,000	
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	Kab. Lamongan	127 Pelanggaran	3,083,581,700	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	Kab. Lamongan	46 Pelanggar	2,929,899,980	



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

1	05	02	2.02	01	9	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Lamongan	34 Laporan	1,708,581,700	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Lamongan	82 Laporan	588,046,280	
1	05	02	2.02	03	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Lamongan	47 Laporan	1,300,000,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Lamongan	40 Laporan	2,332,070,000	
1	05	02	2.02	02	10	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Lamongan	78 Laporan	75,000,000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Lamongan	6 Laporan	9,783,700	
1	05	04				Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan kejadian non kebakaran yang tertangani	Kab. Lamongan	100%	410,000,000	Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan kejadian non kebakaran yang tertangani	Kab. Lamongan	100%	38,719,700	
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kejadian kebakaran yang tertangani	Kab. Lamongan	46 Laporan	340,000,000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kejadian kebakaran yang tertangani	Kab. Lamongan	46 Laporan	32,252,800	
						Jumlah laporan kejadian non kebakaran yang tertangani			96 Laporan		Jumlah laporan kejadian non kebakaran yang tertangani			96 Laporan		
1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Lamongan	100 Dokumen	70,000,000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Lamongan	100 Dokumen	5,192,000	



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

1	05	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Lamongan	47 Dokumen	170,000,000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Lamongan	50 Aparatur	8,009,100	
1	05	04	2	01	17	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Lamongan	20 Unit	100,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Lamongan	6 Unit	19,051,700	
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase instansi/lembaga yang diberdayakan	Kab. Lamongan	100%	70,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase instansi/lembaga yang diberdayakan	Kab. Lamongan	100%	6,466,900	
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Lamongan	625 Orang	70,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Lamongan	625 Orang	6,466,900	
Total										25,816,996,500					18,273,832,690	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, terdapat 7 Prioritas Nasional. Satuan Polisi Pamong Praja termasuk di dalam Prioritas ke-7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik dengan Arah Kebijakan antara lain:

- a. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
- b. Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya;
- d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan
- e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.



3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada Pilbup yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 serta RPJM Nasional Tahun 2025-2029 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, adalah:

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- 2) Kejayaan** yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai Kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin,



terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.

- 3) **Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- 4) **Berkelanjutan** menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan lingkungan hidup serta harmoni sosial.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan masuk pada Misi ke-4 dari 5 Misi Kabupaten Lamongan, yang isinya sebagai berikut: **Meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesalehan sosial masyarakat melalui sikap toleran, solidaritas sosial yang meningkat, stabilita ketentraman dan ketertiban lingkungan meningkat. Selain itu kesalehan sosial juga dapat direpresentasikan dengan menjaga kelestarian nilai budaya lokal dan kepedulian terhadap pemerlu kesejahteraan sosial.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja



Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke-4 (empat) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan pada tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan, agar tercipta sebuah perencanaan yang sinergi dari daerah sampai ke tingkat nasional. Rencana Perubahan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:



Tabel 3.3
DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nomor						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/ BERKURANG	Catatan Penting
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10=9-6)	(8)
1	05					Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat			17,267,877,125.00			18,288,832,690.00		
1	05	01				Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lamongan	100%	14,112,762,345.00	Kab. Lamongan	100%	15,184,250,110.00	1,197,171,665.00	
1	05	01	1			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	100%	40,000,000.00	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	100%	33,352,100.00	-	
1	05	01	1	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Lamongan	5 dokumen	10,000,000.00	Kab. Lamongan	5 dokumen	6,412,800.00		
1	05	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamongan	2 Laporan	10,000,000.00	Kab. Lamongan	2 Laporan	6,939,300.00		
1	05	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamongan	9 Laporan	20,000,000.00	Kab. Lamongan	9 Laporan	20,000,000.00		



1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan	Persentase kelancaran administrasi keuangan	Kab. Lamongan	100%	9,731,486,727.00	Kab. Lamongan	100%	11,887,939,692.00	2,164,371,665.00	
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamongan	1.946 Orang	9,701,486,727.00	Kab. Lamongan	1.946 Orang	11,865,858,392.00	2,164,371,665.00	
1	05	01	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamongan	3 Lap.	10,000,000.00	Kab. Lamongan	3 Lap.	7,193,600.00		
1	05	01	2	02	07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Lamongan	14 Laporan	10,000,000.00	Kab. Lamongan	14 Laporan	7,104,200.00		
1	05	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lamongan	12 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Lamongan	12 Dokumen	7,783,500.00		
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlaksana	Kab. Lamongan	0%	15,000,000.00	Kab. Lamongan	-	-	-	
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Lamongan	-	-	Kab. Lamongan	-	-	-	
1	05	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Lamongan	0	15,000,000.00	Kab. Lamongan	-	-	-	



1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang tersedia dan terselenggara	Kab. Lamongan	100%	79,803,900.00	Kab. Lamongan	100%	61,484,500.00	-	
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	20 Paket	7,496,700.00	Kab. Lamongan	14 Paket	7,496,700.00		
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	30 Paket	10,000,000.00	Kab. Lamongan	12 Paket	9,990,000.00		
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	13 Paket	14,307,200.00	Kab. Lamongan	13 Paket	12,373,300.00		
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Paket	15,000,000.00		1 Paket	11,250,000.00		
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Lamongan	1 Dok.	8,000,000.00	Kab. Lamongan	1 Dokumen	7,983,000.00		
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamongan	9 Laporan Perjalanan Dinas	25,000,000.00	Kab. Lamongan	9 Laporan	12,391,500.00		
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Kab. Lamongan	100%	30,000,000.00	Kab. Lamongan	100%	29,660,500.00	-	
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Lamongan	-	-	Kab. Lamongan	-	-		
1	05	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Unit	15,000,000.00	Kab. Lamongan	1 Paket	14,660,500.00		
1	05	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Lamongan	0	15,000,000.00	Kab. Lamongan	-	15,000,000.00		



1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamongan	100%	3,756,498,618.00	Kab. Lamongan	100%	2,781,800,618.00	967,200,000.00	-
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lamongan	1 Laporan	4,980,000.00	Kab. Lamongan	1 Laporan	4,954,000.00		
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Lamongan	12 Laporan	203,279,280.00	Kab. Lamongan	12 Laporan	203,279,280.00		-
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	1 Laporan	15,000,000.00	Kab. Lamongan	1 Laporan	7,528,000.00		
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Lamongan	14 Laporan	3,533,239,338.00	Kab. Lamongan	14 Laporan	2,566,039,338.00	967,200,000.00	-
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Lamongan	100%	459,973,100.00	Kab. Lamongan	100%	390,012,700.00		-
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Lamongan	2 Unit	59,973,100.00	Kab. Lamongan	2 Unit	58,045,400.00		
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Lamongan	17 Unit	300,000,000.00	Kab. Lamongan	17 Unit	281,967,300.00		
1	05	01	2	09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Lamongan	3 UNIT	100,000,000.00	Kab. Lamongan	1 Gedung	50,000,000.00		



1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	02				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran gangguan trantibum	Kab. Lamongan	100%	3,105,114,780.00	Kab. Lamongan	100%	3,065,862,880.00		
							Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah		100%			100%			
1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran gangguan trantibum yang tertangani	Kab. Lamongan	250 Kasus	166,998,500.00	Kab. Lamongan	34 Kasus	135,962,900.00		
1	05	02	2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Lamongan	10 Dokumen	20,000,000.00	Kab. Lamongan	20 Dokumen	9,469,700.00		
1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum	Kab. Lamongan	4 Dokumen	19,998,500.00	Kab. Lamongan	1 Dokumen	18,908,900.00		
1	05	02	2	01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	225 Orang	50,000,000.00	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	86 Orang	43,524,500.00		
1	05	02	2	01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	1 Kerjasama	10,000,000.00	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	1 Dokumen	5,261,100.00		



1	05	02	2	01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	50 Kasus	40,000,000.00	Dalam dan Luar Kab. Lamongan	20 Kasus	35,153,600.00		
1	05	02	2	01	16	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Lamongan	200 Kasus	25,000,000.00	Kab. Lamongan	14 Kasus	21,645,100.00		
1	05	02	2	01	17	Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kab. Lamongan	1 kasus (1 laporan)	2,000,000.00	Kab. Lamongan	1 Laporan	2,000,000.00		
												0%			
1	05	02	2	02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang tertangani	Kab. Lamongan	46 Pelanggar	2,938,116,280.00	Kab. Lamongan	46 Pelanggar	2,929,899,980.00		
1	05	02	2.02	01	9	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok masyarakat/Pelaku Usaha/	Kab. Lamongan	34 Laporan	588,046,280.00	Kab. Lamongan	82 Laporan	588,046,280.00		
1	05	02	2.02	03	11	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab. Lamongan	40 Laporan	2,332,070,000.00	Kab. Lamongan	40 Laporan	2,332,070,000.00		



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

1	05	02	2.02	02	12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lamongan	78 Laporan	18,000,000.00	Kab. Lamongan	6 Laporan	9,783,700.00		
1	05	04				Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan kejadian non kebakaran yang tertangani	Kab. Lamongan	100%	50,000,000.00	Kab. Lamongan	100%	38,719,700.00		
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kejadian kebakaran yang tertangani	Kab. Lamongan	46 Laporan	40,000,000.00	Kab. Lamongan	100 Laporan	32,252,800.00		
1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Lamongan	100 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Lamongan	100 Dokumen	5,192,000.00		
1	05	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab. Lamongan	50 Aparatur	10,000,000.00	Kab. Lamongan	50 Aparatur	8,009,100.00		
1	05	04	2	01	17	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Lamongan	6 Unit	20,000,000.00	Kab. Lamongan	6 Unit	19,051,700.00		
												0%			
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase instansi/lembaga yang diberdayakan	Kab. Lamongan	100%	10,000,000.00	Kab. Lamongan	100%	6,466,900.00		



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Lamongan	625 Orang	10,000,000.00	Kab. Lamongan	625 Orang	6,466,900.00		
Total										17,267,877,125			18,288,832,690	1,197,171,665	-



BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

b. Catatan Penting

RENJA Perubahan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Satuan



Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

c. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Renja Perubahan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan atas pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan pada tribulan akhir tahun anggaran yaitu 2025

d. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan 2025 dilakukan setelah adanya penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Pejabat Yang berwenang.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan dapat bermanfaat.

Lamongan, Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**

JARWITO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701022 199003 1 003



Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

c. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Renja Perubahan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan atas pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan pada tribulan akhir tahun anggaran yaitu 2025

d. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan 2025 dilakukan setelah adanya penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Pejabat Yang berwenang.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan dapat bermanfaat.

Lamongan, Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMONGAN**



JARWITO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701022 199003 1 003